BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR [illegible] TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan [illegible] Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor [illegible] Tahun 2021 tentang pembentukan [illegible] pelaksanaan daerah Kabupaten Lampung Selatan [illegible] Nomor 7 Tahun 2019 tentang [illegible] dan [illegible] pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, [illegible] perlu [illegible] pendelegasian kepada [illegible] Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, [illegible] perlu [illegible] pelaksanaan [illegible] dengan [illegible] pemerintah [illegible] Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah [illegible] dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung [illegible] Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible];

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible]);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Kendali Mutu Evaluasi Dokumen Dan Pelaksanaan Tata Naskah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembentukan [illegible] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan dan [illegible] Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 20);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Jenis Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah yang meliputi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pajak daerah yang meliputi kewenangan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan urusan teknis operasional dan/atau urusan penunjang teknis tertentu yang berada pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan urusan teknis operasional yang berada langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan urusan teknis operasional yang berada langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.
11. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
12. Pajak Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak yang dipungut oleh Daerah Kabupaten dalam wilayah Kabupaten yang berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mendaftarkan diri, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak, menghitung dan/atau melunasi pajak yang terutang, dan/atau melunasi pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[illegible]

[illegible]

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 2

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (PPS) yaitu :

1. Jenjang Pendidikan, terdiri dari :
   1. UPTD Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri :
      1. SD Negeri 1 Gunungsari
      2. SD Negeri 2 Gunungsari
      3. SD Negeri 3 Gunungsari
      4. SD Negeri 1 Mataram
      5. SD Negeri 1 Bratasi Barat
      6. SD Negeri 2 Bratasi Barat
      7. SD Negeri 3 Bratasi Barat
      8. SD Negeri 4 Bratasi Barat
      9. SD Negeri 1 Kecamatan
      10. SD Negeri 2 Kecamatan
      11. SD Negeri 4 Kecamatan
      12. SD Negeri 1 Negara Baru
      13. SD Negeri 2 Negara Baru
      14. SD Negeri 3 Negara Baru
      15. SD Negeri 1 Nyiur
      16. SD Negeri 2 Nyiur
      17. SD Negeri 3 Nyiur
      18. SD Negeri 4 Nyiur
      19. SD Negeri 1 Merak Batu
      20. SD Negeri 2 Merak Batu
      21. SD Negeri 3 Merak Batu
      22. SD Negeri 4 Merak Batu
      23. SD Negeri 1 Gulimas
      24. SD Negeri 2 Gulimas
      25. SD Negeri 1 Bulang Barat
      26. SD Negeri 2 Bulang Barat
      27. SD Negeri 3 Bulang Barat
      28. SD Negeri 1 Bulang Utara
      29. SD Negeri 2 Bulang Utara
      30. SD Negeri 1 Bulang Selatan
      31. SD Negeri 2 Bulang Selatan
      32. SD Negeri 1 Bulang Timur
      33. SD Negeri 2 Bulang Timur
      34. SD Negeri 1 Kayumas
      35. SD Negeri 2 Kayumas
      36. SD Negeri 3 Kayumas
      37. SD Negeri 1 Tanjung Sari
      38. SD Negeri 2 Tanjung Sari
      39. SD Negeri 1 Gunung Ayu
      40. SD Negeri 2 Gunung Ayu

41. SD Negeri 1 Bojonegara
42. SD Negeri 2 Bojonegara
43. SD Negeri 1 Banjarsari
44. SD Negeri 2 Banjarsari
45. SD Negeri 1 Pabuaran
46. SD Negeri 2 Pabuaran
47. SD Negeri 1 Bakung Negara
48. SD Negeri 2 Bakung Negara
49. SD Negeri 1 Gerenang Barat
50. SD Negeri 2 Gerenang Barat
51. SD Negeri Kasemen
52. SD Negeri Kilasah Pulo
53. SD Negeri Karangtanjung
54. SD Negeri Pancanegara
55. SD Negeri Alun-Alun
56. SD Negeri Sidomulyo
57. SD Negeri 1 Sidomulyo
58. SD Negeri 1 Samang Anyar
59. SD Negeri 2 Samang Anyar
60. SD Negeri 3 Samang Anyar
61. SD Negeri 4 Samang Anyar
62. SD Negeri 5 Samang Anyar
63. SD Negeri 6 Samang Anyar
64. SD Negeri Kaloang Baja
65. SD Negeri Kaloang Nyar
66. SD Negeri 1 Lidi Wilayu
67. SD Negeri 2 Lidi Wilayu
68. SD Negeri 3 Lidi Wilayu
69. SD Negeri 4 Lidi Wilayu
70. SD Negeri 5 Lidi Wilayu
71. SD Negeri 6 Lidi Wilayu
72. SD Negeri 1 Nibakarja
73. SD Negeri 2 Nibakarja
74. SD Negeri 1 Way Dawi
75. SD Negeri 2 Way Dawi
76. SD Negeri 1 Bawa Bejida
77. SD Negeri 2 Bawa Bejida
78. SD Negeri 3 Bawa Bejida
79. SD Negeri 1 Margatunggal
80. SD Negeri 2 Margatunggal
81. SD Negeri 1 Bojonegara
82. SD Negeri 2 Bojonegara
83. SD Negeri 3 Bojonegara
84. SD Negeri 4 Bojonegara
85. SD Negeri 1 Margagiling
86. SD Negeri 2 Margagiling
87. SD Negeri 1 Pagar Batu
88. SD Negeri 2 Pagar Batu
89. SD Negeri 1 Margaluyu
90. SD Negeri 2 Margaluyu
91. SD Negeri Margaluyu

92. [illegible] Negeri 1 [illegible]
93. [illegible] Negeri 2 [illegible]
94. [illegible] Negeri 3 [illegible]
95. [illegible] Negeri [illegible]
96. [illegible] Negeri [illegible]
97. [illegible] Negeri [illegible]
98. [illegible] Negeri [illegible]
99. [illegible] Negeri [illegible]
100. [illegible] Negeri [illegible]
101. [illegible] Negeri [illegible]
102. [illegible] Negeri 1 [illegible]
103. [illegible] Negeri 2 [illegible]
104. [illegible] Negeri 3 [illegible]
105. [illegible] Negeri 1 [illegible]
106. [illegible] Negeri 2 [illegible]
107. [illegible] Negeri 3 [illegible]
108. [illegible] Negeri 4 [illegible]
109. [illegible] Negeri 5 [illegible]
110. [illegible] Negeri 1 [illegible]
111. [illegible] Negeri 2 [illegible]
112. [illegible] Negeri 3 [illegible]
113. [illegible] Negeri 4 [illegible]
114. [illegible] Negeri 1 [illegible]
115. [illegible] Negeri [illegible]
116. [illegible] Negeri 1 [illegible]
117. [illegible] Negeri 2 [illegible]
118. [illegible] Negeri 3 [illegible]
119. [illegible] Negeri 1 [illegible]
120. [illegible] Negeri 2 [illegible]
121. [illegible] Negeri 3 [illegible]
122. [illegible] Negeri 1 [illegible]
123. [illegible] Negeri 2 [illegible]
124. [illegible] Negeri 3 [illegible]
125. [illegible] Negeri 4 [illegible]
126. [illegible] Negeri 1 [illegible]
127. [illegible] Negeri 2 [illegible]
128. [illegible] Negeri 1 [illegible]
129. [illegible] Negeri 2 [illegible]
130. [illegible] Negeri 1 [illegible]
131. [illegible] Negeri 2 [illegible]
132. [illegible] Negeri 1 [illegible]
133. [illegible] Negeri 2 [illegible]
134. [illegible] Negeri 1 [illegible]
135. [illegible] Negeri 2 [illegible]
136. [illegible] Negeri 1 [illegible]
137. [illegible] Negeri 2 [illegible]
138. [illegible] Negeri [illegible]
139. [illegible] Negeri 1 [illegible]
140. [illegible] Negeri 2 [illegible]
141. [illegible] Negeri 1 [illegible]
142. [illegible] Negeri 2 [illegible]

(110) (0) Bagian 2 Tanjung Ayang
(111) (0) Bagian 1 Kotabaru
(112) (0) Bagian 2 Kotabaru
(113) (0) Bagian 1 Kotabaru
(114) (0) Bagian 2 Kotabaru
(115) (0) Bagian 3 Kotabaru
(116) (0) Bagian 4 Kotabaru
(117) (0) Bagian 5 Kotabaru
(118) (0) Bagian 1 Pantaiberkah
(119) (0) Bagian 2 Pantaiberkah
(120) (0) Bagian 3 Pantaiberkah
(121) (0) Bagian 4 Pantaiberkah
(122) (0) Bagian 5 Pantaiberkah
(123) (0) Bagian 1 Pagiyanten
(124) (0) Bagian 2 Pagiyanten
(125) (0) Bagian 3 Pagiyanten
(126) (0) Bagian 1 Taman Tunjungsari
(127) (0) Bagian 2 Taman Tunjungsari
(128) (0) Bagian 1 Bangsal Tri Tunggal
(129) (0) Bagian 2 Bangsal Tri Tunggal
(130) (0) Bagian 1 Tunjungsari
(131) (0) Bagian 2 Tunjungsari
(132) (0) Bagian 1 Karya Tunggal
(133) (0) Bagian 2 Karya Tunggal
(134) (0) Bagian 1 Tanjung Baru
(135) (0) Bagian 2 Tanjung Baru
(136) (0) Bagian 1 Sabang Bukaneer
(137) (0) Bagian 1 Gulajaya
(138) (0) Bagian 1 Bakauheulan
(139) (0) Bagian 1 Banjar Rejo
(140) (0) Bagian 2 Banjar Rejo
(141) (0) Bagian 1 Mekarsari
(142) (0) Bagian 2 Mekarsari
(143) (0) Bagian 3 Mekarsari
(144) (0) Bagian 4 Mekarsari
(145) (0) Bagian 5 Mekarsari
(146) (0) Bagian 1 Mekarsaluyu
(147) (0) Bagian 2 Mekarsaluyu
(148) (0) Bagian 3 Mekarsaluyu
(149) (0) Bagian 4 Mekarsaluyu
(150) (0) Bagian 1 Mekarsari
(151) (0) Bagian 2 Mekarsari
(152) (0) Bagian 3 Mekarsari
(153) (0) Bagian 4 Mekarsari
(154) (0) Bagian 1 Mekarsaluyu
(155) (0) Bagian 2 Mekarsaluyu
(156) (0) Bagian 3 Mekarsaluyu
(157) (0) Bagian 1 Sukamanggu
(158) (0) Bagian 2 Sukamanggu
(159) (0) Bagian 1 Tanjung Baru
(160) (0) Bagian 2 Tanjung Baru
(161) (0) Bagian 1 Sukaji
(162) (0) Bagian 2 Sukaji
(163) (0) Bagian 1 Kedungsari

[194] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[195] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[196] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[197] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[198] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[199] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[200] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[201] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[202] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[203] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[204] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[205] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[206] [illegible] Bogor 3 [illegible]
[207] [illegible] Bogor 4 [illegible]
[208] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[209] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[210] [illegible] Bogor 3 [illegible]
[211] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[212] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[213] [illegible] Bogor 3 [illegible]
[214] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[215] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[216] [illegible] Bogor 3 [illegible]
[217] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[218] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[219] [illegible] Bogor 3 [illegible]
[220] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[221] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[222] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[223] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[224] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[225] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[226] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[227] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[228] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[229] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[230] [illegible] Bogor 3 [illegible]
[231] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[232] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[233] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[234] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[235] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[236] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[237] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[238] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[239] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[240] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[241] [illegible] Bogor 1 [illegible]
[242] [illegible] Bogor 2 [illegible]
[243] [illegible] Bogor 3 [illegible]
[244] [illegible] Bogor 1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. UPTD [illegible] Pendidikan [illegible] Menengah Provinsi [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]
15. [illegible]
16. [illegible]
17. [illegible]
18. [illegible]
19. [illegible]
20. [illegible]
21. [illegible]
22. [illegible]
23. [illegible]
24. [illegible]
25. [illegible]
26. [illegible]
27. [illegible]

10. SMP Negeri 3 [illegible]
10. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
10. SMP Negeri 1 [illegible]
11. SMP Negeri 2 [illegible]
11. SMP Negeri 1 [illegible]
11. SMP Negeri 2 [illegible]
11. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
12. SMP Negeri 1 [illegible]
12. SMP Negeri 2 [illegible]
12. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
13. SMP Negeri 1 [illegible]
13. SMP Negeri 2 [illegible]
13. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
14. SMP Negeri 1 [illegible]
14. SMP Negeri 2 [illegible]
14. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
15. SMP Negeri 1 [illegible]
15. SMP Negeri 2 [illegible]
15. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
16. SMP Negeri 1 [illegible]
16. SMP Negeri 2 [illegible]
16. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
17. SMP Negeri 1 [illegible]
17. SMP Negeri 2 [illegible]
17. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
18. SMP Negeri 1 [illegible]
18. SMP Negeri 2 [illegible]
18. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
19. SMP Negeri 1 [illegible]
19. SMP Negeri 2 [illegible]
19. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
20. SMP Negeri 1 [illegible]
20. SMP Negeri 2 [illegible]
20. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
21. SMP Negeri 1 [illegible]
21. SMP Negeri 2 [illegible]
21. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
22. SMP Negeri 1 [illegible]
22. SMP Negeri 2 [illegible]
22. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
23. SMP Negeri 1 [illegible]
23. SMP Negeri 2 [illegible]
23. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
24. SMP Negeri 1 [illegible]
24. SMP Negeri 2 [illegible]
24. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
25. SMP Negeri 1 [illegible]
25. SMP Negeri 2 [illegible]
25. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
26. SMP Negeri 1 [illegible]
26. SMP Negeri 2 [illegible]
26. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
27. SMP Negeri 1 [illegible]
27. SMP Negeri 2 [illegible]
27. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
28. SMP Negeri 1 [illegible]
28. SMP Negeri 2 [illegible]
28. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
29. SMP Negeri 1 [illegible]
29. SMP Negeri 2 [illegible]
29. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
30. SMP Negeri 1 [illegible]
30. SMP Negeri 2 [illegible]
30. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
31. SMP Negeri 1 [illegible]
31. SMP Negeri 2 [illegible]
31. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]
32. SMP Negeri 1 [illegible]
32. SMP Negeri 2 [illegible]
32. SMP Negeri Satu Atap 1 [illegible]

j. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) [illegible]
1. PAUD Negeri [illegible]
2. PAUD Negeri [illegible]
3. PAUD Negeri [illegible]

2. [illegible]
a. UPTD [illegible]
1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

9. Puskesmas Pembantu [illegible];
10. Puskesmas Pembantu [illegible];
11. Puskesmas [illegible];
12. Puskesmas Pembantu [illegible];
13. Puskesmas [illegible];
14. Puskesmas Pembantu [illegible];
15. Puskesmas [illegible];
16. Puskesmas Pembantu [illegible];
17. Puskesmas [illegible];
18. Puskesmas Pembantu [illegible];
19. Puskesmas Pembantu [illegible];
20. Puskesmas [illegible];
21. Puskesmas Pembantu [illegible];
22. Puskesmas [illegible];
23. Puskesmas [illegible];
24. Puskesmas [illegible];
25. Puskesmas Pembantu [illegible];
26. Puskesmas Pembantu [illegible];
27. Puskesmas [illegible];
28. Puskesmas [illegible].

b. UPTD [illegible];

c. UPTD [illegible];

f. Dinas Pengelola Gedung dan Perumahan Rakyat, terdiri dari :

a. UPTD [illegible];

b. UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan, terdiri dari :

1) UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan Kecamatan Wilayah I, dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible], Kecamatan [illegible], Kecamatan [illegible] dan Kecamatan [illegible];

2) UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan Kecamatan Wilayah II, dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible], Kecamatan [illegible] dan Kecamatan [illegible];

3) UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan Kecamatan Wilayah III, dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible], Kecamatan [illegible] dan Kecamatan [illegible];

4) UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan Kecamatan Wilayah IV, dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible] dan Kecamatan [illegible];

5) UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan Kecamatan Wilayah V, dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible], [illegible], Kecamatan [illegible] dan Kecamatan [illegible];

6) UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan Kecamatan Wilayah VI, dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible] dan [illegible];

7) UPTD Pengelola Gedung dan Perumahan Kecamatan Wilayah VII, dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible];

c. UPTD Pemeliharaan Penerangan dan Perlengkapan [illegible];

g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

a. UPTD Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan, yang [illegible];

f. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

a. UPTD Laboratorium Lingkungan [illegible];

b. UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari:

1) UPTD Pengelolaan Sampah Dinas 1, berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Kotanaga, Kayuwangi, Kalirejo, Wayhalim, Way Pengadu dan Gunungsari;

2) UPTD Pengelolaan Sampah Dinas 2, berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Bukit Kemuning, Sukadana;

3) UPTD Pengelolaan Sampah Dinas 3, berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Sukadana, Pasirsakti, Labuhan, Pasir Sakti Ilir;

4) UPTD Pengelolaan Sampah Dinas 4, berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Gunung Terang, Tanjung Raya, Mesuji, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Rawajitu Selatan dan Wan Tomi.

g. Dinas Perhubungan, terdiri dari:

a. UPTD Balai Uji Berat Jalan (BBJ) Tanjung;

b. UPTD Terminal Penumpang Jenis (TPJ):

1) UPTD TPJ Gunung Sugih, berkedudukan di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kotagajah dengan wilayah kerja meliputi TPJ Gunung Sugih serta pelayanan perhubungan di Kecamatan Kotagajah, Desa Gunung Sugih, Desa Pagar Dewa dan Desa Kotagajah;

2) UPTD TPJ Way Abung, berkedudukan di Desa Way Abung Kecamatan Abung Timur dengan wilayah kerja meliputi TPJ Way Abung serta pelayanan perhubungan di Kecamatan Abung Timur, Desa Way Abung dan Kecamatan Abung Barat;

3) UPTD TPJ Kotaraja Jaya, berkedudukan di Desa Kotaraja Agung Kecamatan Mesuji dengan wilayah kerja meliputi TPJ Kotaraja Jaya serta pelayanan perhubungan di Kecamatan Mesuji, Desa Kotaraja Jaya, Desa Kotaraja Agung, Kecamatan Mesuji.

i. Dinas Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

a. UPTD Balai Pelestari Kawasan Pariwisata Pemuda, terdiri dari Balai Pelestarian; dan

b. UPTD Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

1) UPTD Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata Sukadana, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukadana;

2) UPTD Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata Raja Basa, dengan wilayah kerja Kecamatan Raja Basa;

3) UPTD Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata Pemangkubumi, dengan wilayah kerja Kecamatan Pemangkubumi;

4) UPTD Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata Bukit Kemuning, dengan wilayah kerja Kecamatan Bukit Kemuning;

5) UPTD Pariwisata Pemuda, Kebudayaan dan Pariwisata Pulau, dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau.

6. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu, dengan wilayah kerja Kecamatan Bengkulu;
7. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Muara Bangka, dengan wilayah kerja Kecamatan Muara Bangka;
8. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang, dengan wilayah kerja Kecamatan Kepahiang;
9. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wilayah kerja Kecamatan Bengkulu Tengah;
10. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lebong, dengan wilayah kerja Kecamatan Lebong;
11. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong, dengan wilayah kerja Kecamatan Rejang Lebong;
12. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wilayah kerja Kecamatan Bengkulu Utara;
13. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Seluma, dengan wilayah kerja Kecamatan Seluma;
14. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mukomuko, dengan wilayah kerja Kecamatan Mukomuko;
15. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wilayah kerja Kecamatan Bengkulu Selatan;
16. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kaur, dengan wilayah kerja Kecamatan Kaur;
17. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Ujan Mas, dengan wilayah kerja Kecamatan Ujan Mas;
18. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Ratu, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Ratu;
19. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Sakti, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Sakti;
20. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang, dengan wilayah kerja Kecamatan Kepahiang;
21. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bermani Ulu, dengan wilayah kerja Kecamatan Bermani Ulu;
22. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bermani Ulu Raya, dengan wilayah kerja Kecamatan Bermani Ulu Raya;

4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
   a. UPTD Bibit Ternak Sebelung ;
   b. UPTD Bibit Pembiakan Ternak Cita ;
   c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri atas :
      1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Sukau, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukau ;
      2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Tanjung Kemuning, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Kemuning ;
      3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Talang Ulu, dengan wilayah kerja Kecamatan Talang Ulu dan Kecamatan Pagar Jati ;
      4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Talang Ulu, dengan wilayah kerja Kecamatan Talang Ulu dan Kecamatan Ulu Manna ;
      5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kaliberu, dengan wilayah kerja Kecamatan Kaliberu ;
      6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Pematang Lebar, dengan wilayah kerja Kecamatan Pematang Lebar dan Kecamatan Ulu Manna ;
      7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Kecamatan Kaur, dengan wilayah kerja Kecamatan Kaur dan Kecamatan Nasal ;
      8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Arah Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Arah Agung ;

[illegible]

9. UPTD Pasar [illegible] Kecamatan [illegible], dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible];
10. UPTD Pasar [illegible] Kecamatan [illegible], dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible] dan Kecamatan [illegible];
11. UPTD Pasar [illegible] Kecamatan [illegible], dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible] dan [illegible];
12. UPTD Pasar [illegible] Kecamatan [illegible], dengan wilayah kerja Kecamatan [illegible] dan [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

i. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Ade Agung, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Ade Agung; dan

j. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Tanjung, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Tanjung.

(2) Dinas Pendapatan Kabupaten Kota Pemekaran, terdiri dari :

a. UPTD Pendapatan Kabupaten Kota Pemekaran Timur, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Timur Dan Lok Agung;

b. UPTD Pendapatan Kabupaten Kota Pemekaran Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Bintang Mas Makmur, Tanjung Bintang, Tanjung Kait, Ana Bintang;

c. UPTD Pendapatan Kabupaten Kota Pemekaran Sukabung, dengan wilayah kerja Sukabung, Tanjungsawit Bahtera;

d. UPTD Pendapatan Kabupaten Kota Pemekaran Dusun, dengan wilayah kerja Dusun, Bintang, Pinggir dan Bandarjaya; dan

e. UPTD Pendapatan Kabupaten Kota Pemekaran Kalianda, dengan wilayah kerja Kalianda, Rajabasa, Raja Basa Dan Penengahan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 3

(1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditugaskan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang yang masing-masing dijabat oleh masing Kepala UPTD, dengan ketentuan: UPTD Pendapatan dipimpin oleh Kepala Pendapatan, UPTD Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang dan UPTD lainnya dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan yang menjadi pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak berdiri sendiri; serta tidak bertugas langsung dengan pemerintah atau masyarakat kecuali diatur.

(2) Pelaksanaan dari tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD diatur sesuai dengan wilayah administrasi kecamatan dimana kantornya dan tidak melampaui wilayah UPTD lainnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan operasional dan/atau penunjang urusan dengan bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kegiatan teknis fungsional dan/atau operasional penunjangnya;

c. pelaksanaan administrasi teknis operasional dan/atau teknis.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Satu

UPTD Sekolah Penddikan Sekolah Dasar

Satu Sekolah Penddikan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

(1) UPTD Sekolah Penddikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Penddikan dalam jenjang Sekolah mengurus pada satuan penddikan Sekolah Dasar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Sekolah Penddikan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkajian pelayanan Sekolah mengurus;
b. pelaksanaan dan pengurusan kegiatan penddikan dan sekolah, [illegible] dan kemitraan pelajar di sekolah;
c. pelaksanaan dan pengembangan, penddikan, mengurus [illegible] di sekolah;
d. pelaksanaan [illegible] kemitraan pelajar [illegible];
e. pelaksanaan [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible];
f. pelaksanaan dan [illegible] penddikan [illegible] dan
g. pelaksanaan fungsi [illegible] yang [illegible] oleh [illegible].

Paragraf 2

Struktur Organisasi

Pasal 8

(1) Struktur Organisasi UPTD Sekolah Penddikan Sekolah Dasar terdiri dari :

a. Kepala Sekolah; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru dan pendidik jabatan yang ditentukan tugas tambahnya, berasal dari [illegible] dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan [illegible] [illegible] jabatan yang berasal dari [illegible] dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sekolah Penddikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam [illegible] dari sebagaimana bagan yang telah [illegible] dan [illegible] dengan [illegible].

Bagian I

Umum Tugas

Pasal 7

(1) Tugas Kepala Sekolah, [illegible] tugas [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Bagian Kelima

UPTD Sekolah Pendidikan Menengah Pertama

Pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

(1) UPTD Sekolah Pendidikan Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam proses belajar mengajar pada Sekolah Pendidikan Menengah Pertama.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Sekolah Pendidikan Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan pengendalian proses belajar mengajar;
b. pembinaan dan pengawasan kegiatan produktif dan keterampilan, dalam rangka dan kemandirian peserta didik;
c. pembinaan dan pengembangan produktif sesuai kemampuan dan potensi;
d. pelaksanaan bimbingan dan konseling peserta didik;
e. pelaksanaan administrasi sekolah/madrasah, kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana dan tenaga pendidik;
f. pelaksanaan dan evaluasi program sekolah dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan organisasi UPTD Sekolah Pendidikan Menengah Pertama, terdiri dari :

a. Kepala Sekolah, dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan struktural yang dan jabatan tertinggi yang dibebankan kepada Eselon IV/a dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di sekolah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sekolah Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf V

Tugas Tugas

Pasal 11

(1) Dapat [illegible] mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan, mengoordinasikan dan mempunyai program dan kegiatan [illegible] mempunyai pada [illegible] pendidikan [illegible] Paragraf [illegible] tugas [illegible] yang dimaksud [illegible] program pendidikan [illegible] yang [illegible].

(2) Adapun tugas Kepala [illegible] yaitu :

a. [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

Bagian Ketiga

UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

(1) UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas pokok dan teknis sebagian tugas dan wewenang Dinas Pendidikan pada proses belajar mengajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak;

b. pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan dan Tenaga kependidik;

c. penyiapan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah;

d. pelaksanaan pembinaan pada satuan pendidikan;

e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana dan kesiswaan;

f. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari :

a. Kepala UPTD; dan

b. Subbagian Urusan Tata Usaha.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai jabatan fungsional yang diatur dan wewenang kepada UPTD yang bersifat diberikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Subbagian Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termaktub dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang utuh peraturan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 13

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan data, informasi, sistem informasi manajemen pada pemerintahan daerah, data dan informasi kependudukan yang diintegrasikan berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan.

(2) Dalam tugas Kepala UPTD, yaitu :

a. mengumpulkan bahan, mengolah data, mengumpulkan data dan mengumpul informasi dan jaringan informasi [illegible]
b. mengumpulkan [illegible] pemeliharaan, pengembangan, pengumpulan data, pengolahan, pengumpulan, pelaporan, kualitasnya, [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] pemerintahan;
c. mengatur [illegible] jaringan [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible]; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesatu
UPTD Pusat Data dan Informasi Kependudukan
Pada Dinas Kependudukan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 14

(1) UPTD Pusat Data dan Informasi Kependudukan [illegible] mempunyai tugas melaksanakan [illegible] pengumpulan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Pembangunan Prasarana [illegible] dan Pembangunan Prasarana Desa [illegible], berkedudukan di Desa [illegible];

9. Pembangunan [illegible] Desa, [illegible] Desa, [illegible], dengan [illegible] [illegible] pelaksanaan [illegible] di Desa [illegible] Agung, [illegible] Desa, [illegible] Jaya, [illegible] Desa, [illegible], [illegible] dan [illegible] pada [illegible], [illegible] serta [illegible] Pembangunan Prasarana Desa Agung dan Pembangunan Prasarana Desa [illegible], berkedudukan di Desa [illegible];

10. Pembangunan [illegible], dengan [illegible] pelaksanaan [illegible] di Desa [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] Agung, [illegible] dan [illegible] pada [illegible] serta [illegible] Pembangunan Prasarana [illegible], Pembangunan Prasarana [illegible] dan Pembangunan Prasarana [illegible] Agung, berkedudukan di Desa [illegible] Agung;

11. Pembangunan [illegible] dengan [illegible] pelaksanaan [illegible] di Desa [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] pada [illegible] serta [illegible] Pembangunan [illegible], Pembangunan [illegible] dan Pembangunan Prasarana [illegible], berkedudukan di Desa [illegible];

12. Pembangunan [illegible] dengan [illegible] pelaksanaan [illegible] di Desa [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] pada [illegible] serta [illegible] Pembangunan [illegible], [illegible] dan Pembangunan Prasarana [illegible], berkedudukan di Desa [illegible];

13. Pembangunan [illegible], dengan [illegible] pelaksanaan [illegible] di Desa [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] pada [illegible] serta [illegible] Pembangunan [illegible], Pembangunan [illegible], Pembangunan [illegible], Pembangunan [illegible], Pembangunan [illegible] dan [illegible], Pembangunan [illegible] dan Pembangunan [illegible], berkedudukan di Desa [illegible];

e. Puskesmas Desa Tanjung Agung, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Pulau Layu, Tanjung Sari, Tanjung Agung, Tanjungpu, Tiuna Tanjungan dan Bagelasi, pada kecamatan Gedung, serta mencakupi Puskesmas Pembantu Bagi Agung, Puskesmas Pembantu Desa Tanjungan dan Puskesmas Pembantu Bagelasi, berkedudukan di Desa Tanjung Agung.

f. Puskesmas Desa Sinar Gunung, Gedung, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Dentuan, Karya Tunggal, Bakauan, Pematangdua, Bangai Tri Tunggal dan Bakauan pada kecamatan Gedung, serta mencakupi Puskesmas Pembantu Dentuan dan Puskesmas Pembantu Bakauan, berkedudukan di Desa Bakauan.

g. Puskesmas Kecamatan Way Kanan, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Mekar Sari, Kamtan Agung, Talang Way Kanan, Pematangdua, Pematangdua, Bukit Kemiri, Bangun Sari, dan Gunung Kencana, pada Kecamatan Way Kanan, serta mencakupi Puskesmas Pembantu Pematangdua dan Puskesmas Pembantu Kamtan Agung, berkedudukan di Desa Gunung Kencana.

h. Puskesmas Desa Bangunan Jaya Jaya, dengan wilayah kerjanya meliputi pelayanan kesehatan di Desa Tulang Jaya, Lebung Sari, Pagardanau, Bukit Agung, Jaya Guna, dan Tanjung Harapan pada Kecamatan Bukan, Bukaran, serta mencakupi Puskesmas Pembantu Bukit Agung dan Puskesmas Pembantu Tanjung Harapan, berkedudukan di Desa Tulang Jaya.

i. Puskesmas Kecamatan Mekar Mulya, dengan wilayah kerjanya meliputi pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Baru, Sri Mulya, Gunung Sari, Mekar Mulya, Bukau, Bukau Kencana, Tri Harjo, Pasar Tunggal dan Kuang Jaya pada Kecamatan Mekar Mulya, serta mencakupi Puskesmas Pembantu Baru Tanjung, Puskesmas Pembantu Tanjung Kencana, Puskesmas Pembantu Mekar Sari, Puskesmas Pembantu Bukau Kencana, dan Puskesmas Pembantu Mekar Mulya, berkedudukan di Desa Mekar Mulya.

j. Puskesmas Bukit Kemuning Tanjung Kemuning, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Bali Asri, Kemuning, Bukit Dalam, Sukamajuda, Gedik Lestari, Tanjung, Bukit Lestari, Bali Lestari, Asri Mulya, dan Gedik, Tri Mulyo, Tanjung Asri, Pematang Kemuning, Way Galih, Asri Mulya dan Bali Sakti pada Kecamatan Tanjung Kemuning, serta mencakupi Puskesmas Pembantu Bali Asri, Puskesmas Pembantu Bukit Negeri, Puskesmas Bali Lestari, Puskesmas Pembantu Pematang Kemuning dan Puskesmas Pembantu Way Galih, berkedudukan di Desa Asri Mulya.

a. Pembangunan Konstruksi Tanggul Bendungan [illegible] [illegible] [illegible] pelaksanaan konstruksi di Desa [illegible], [illegible], [illegible],

i. Pembantu Bupati atau Dinas Tanjung Bati Bintan, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan di Dinas Tanjung Bati, Dinas Bati, Mutara Pulau, Bintancing, Bati Atas, Pulau Bati pada kecamatan Bintan atau kecamatan Pembantu Bupati atau Bintancing Bati, berkedudukan di Dinas Tanjung Bati.

m. Pembantu Dinas Kalanya, dengan wilayah kerja meliputi: pelayanan kecamatan di desa Bati atas, bintancing, sebuah Bintan, satu negara, pulau Bintan, dalang Bati, dan ada pulau pada kecamatan bintancing bintang atau kecamatan pembantu Bupati atau di negara, pembantu pulau ada pulau, pos kecamatan desa bahak Bintan, pos kecamatan desa mentang atas, atau pos kecamatan desa ada pulau, berkedudukan di desa kalanya dan.

n. Pembantu desa pulau, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kecamatan di desa sumber jaya, bintang agung, desa negara, adalah jaya, pemenuat, dan bintang negara pada kecamatan jaya agung atau kecamatan pos kecamatan desa sumber jaya, pos kecamatan desa bintang agung, pos kecamatan desa adalah jaya pos kecamatan pemenuat dan pos kecamatan desa bintang negara, berkedudukan di desa desa negara.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pembantu bertugas pokok fungsi :

a. pemantauan dan tugas kecamatan masyarakat di desa pemerintah di wilayah kecamatan;

b. pelaksanaan tugas kecamatan pemerintah tertentu pertama di wilayah bertugas dan;

c. pelaksanaan fungsi lain yang ditentukan oleh camat.

Pasal 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, terdiri dari :

a. Kepala Pendidikan;

b. Sub Bagian Tata Usaha, dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh seorang pejabat struktural tertentu yang berasal dari dalam lingkungan Kecamatan atau Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kecamatan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala. Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pendidikan.

(4) Ketentuan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud [illegible] huruf c, dan angka [illegible] pejabat berjenjang [illegible] yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Uraian Tugas

Pasal 3

(1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional [illegible] kesehatan masyarakat perjenjang kepada [illegible] di wilayah kerjanya sesuai [illegible] dengan [illegible] kesehatan masyarakat [illegible] kesehatan, kebersihan dan [illegible] [illegible] di wilayah kerjanya [illegible] dengan [illegible] yang berlaku.

(2) Uraian tugas Kepala Puskesmas sebagai berikut :

a. [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] program dan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya [illegible];

b. [illegible] pelayanan [illegible] yang berhubungan dengan Puskesmas/Pendaftaran Rawat Jalan dan Pendaftaran Perawatan [illegible] pelaksanaan tugas;

c. [illegible] dan [illegible] kegiatan pelayanan kesehatan [illegible] dan pelayanan kesehatan [illegible] [illegible] dan [illegible] Pendaftaran Rawat Jalan dan Pendaftaran Perawatan dan [illegible];

d. [illegible] pelayanan upaya kesehatan [illegible], [illegible] dan [illegible], pelayanan [illegible] [illegible], pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible];

e. [illegible] pelayanan upaya [illegible], pelayanan [illegible] dan [illegible], pelayanan kesehatan gigi [illegible], pelayanan [illegible], upaya kesehatan [illegible], pelayanan kesehatan [illegible] [illegible], pelayanan kesehatan [illegible], pelayanan kesehatan [illegible], pelayanan kesehatan [illegible], [illegible] dan [illegible] (PKP), [illegible] kesehatan [illegible] [illegible], [illegible] kesehatan [illegible] dan [illegible] [illegible].

[illegible]

Pasal IV

(1) Kepala Dinas Bapeda Tata Ruang UPTD Laboratorium Kesehatan [illegible] [illegible] [illegible]

(2) Dalam tugas dapat [illegible] Tata Usaha, yaitu :

a. [illegible] pengajuan [illegible] UPTD [illegible], [illegible] [illegible] Tata Usaha [illegible] [illegible] [illegible]

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeriksaan Kesehatan;
b. Pelaksanaan kegiatan : Pemeriksaan Fisik Pasien Rawat Inap/Jalan, Pemeriksaan Air, Udara, Zat Kimiawi dan Pangan, Serta Pemeriksaan Vector dan Mikrobiologi Medical Dan Kesehatan Ternak;
c. Pemeriksaan Pengujian Zat Pada Bahan Makanan Kesehatan;
d. Pengolahan Data Analisis Data;
e. Dokumentasi Hasil Analisis Laboratorium;
f. Penyampaian Keputusan Kepada Dinas Kesehatan (DINKES);
g. Pengadaan Alat Kerja Laboratorium;
h. Melaksanakan Tata Usaha Laboratorium.

Paragraf 2
Struktur Organisasi
Pasal 21

(1) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, terdiri :
dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jenjang Jabatan
Pasal 22

(1) Jenjang UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana tugas pokok/kompetensi fungsional tertentu ditetapkan berdasarkan pada Laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan penetapan pengelompokan yang berdasar pada kompetensi berdasarkan ketentuan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

(1) Untuk tugas Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

a. mengembalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang laboratorium kesehatan masyarakat;
b. merumuskan pelaksanaan uji laboratorium kesehatan masyarakat dibidang kesehatan;
c. melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik, kesehatan masyarakat dan kesehatan;
d. melaksanakan pemeriksaan lingkungan (dimiliki dan kalibrasi) meliputi air, udara dan kesehatan pangan;
e. melaksanakan pemeriksaan media identifikasi vektor dan serangga vektor;
f. melaksanakan bahan tugas kesehatan baik secara mengacu sebagaimana tugas kesehatan, tugas sesuai operasional yang ada sesuai dengan dan tanggung jawabnya masing-masing;
g. melaksanakan pelayanan tugas kesehatan tugas masyarakat melaksanakan tugas secara bertanggungjawab dan berhasil guna;
h. melaksanakan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai rujukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam bekerja;
i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas kesehatan;
j. melaksanakan tugas kesehatan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan program kerja Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan tugas-tugas dan kesekretariatan, pengelolaan urusan kepegawai, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kehutanan materiil, arsip dan dokumen, protokol, informasi publik dan pelaksanaan laporan barang, aset, tugas pelayanan pemeliharaan sarana yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Untuk tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu :

a. melaksanakan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta melaksanakan urusan kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b. mengelola urusan pelaksanaan pengadaan yang berhubungan dengan barang milik Sub Bagian Tata Usaha dan yang masih belum selesai pemeriksaanya;
c. mengelola pelaksanaan pemeliharaan barang yang berhubungan dengan barang laboratorium kesehatan Masyarakat serta pelayanan pemeliharaan barang yang berhubungan dengan barang milik laboratorium sebagai bantuan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.

[illegible]

Bagian Keempat
UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 24

(1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola, mendistribusikan obat dan bahan kesehatan di bidang farmasi, [illegible] yang berada serta pelaksanaan pengawasan [illegible] UPTD Instalasi Farmasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun Rencana Tugas Kegiatan [illegible] sesuai dengan [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible]

- Penyiapan dan pengelolaan [illegible] [illegible] [illegible]
- Pembakaran [illegible]
- Pengumpulan [illegible] [illegible]
- Pengelolaan [illegible] [illegible]

b. Pelaksanaan Pelaksanaan [illegible] [illegible] [illegible]

(3) Dapat [illegible] Organisasi UPTD [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

f. Melaksanakan [illegible] dan koordinasi kerja dengan [illegible] UPT [illegible] Pengawas [illegible] pengawasan program kerja UPT [illegible] dan [illegible] pelaksanaan pekerjaan;

g. Menyusun, mengumpulkan, dan mempersiapkan [illegible] UPT [illegible] [illegible] agar dapat [illegible] dan [illegible] pada [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

(2) Selain melaksanakan tugas, UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelola dan pengelolaan sistem Olahraga pengelolaan air limbah domestik;
b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah;
c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Struktur Organisasi
Pasal 21

(1) Struktur Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh pejabat struktural eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 22

(1) Kepala UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang pengelolaan air limbah domestik, pelaksana teknis operasional UPTD, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Camat, Kepala Puskesmas dan organisasi lainnya di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan Bidang pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam tugas Kepala UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu :

a. [illegible]

Kepala UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik;

b. [illegible] Kepala UPTD;

c. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik;

d. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] UPTD Balai Pengelolaan Air Limbah Domestik [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan

[illegible]

Pengelolaan Air Limbah Domestik

[illegible]

Pengelolaan Air Limbah Domestik

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bagian Kedelapan

UPTD Pemanfaatan, Pengelolaan Air Limbah dan Sanitasi
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Perumahan Rakyat

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 31

(1) UPTD Pemanfaatan, Pengelolaan Air Limbah dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat dibidang Pemanfaatan, Pengelolaan Air Limbah.

(2) Selain melaksanakan tugas, UPTD Perlengkapan, Pengadaan Aset dan Barang mengemban fungsi :

a. pelaksanaan [illegible] kerja UPTD Perlengkapan, Pengadaan Aset dan Barang;
b. pelaksanaan [illegible] UPTD Perlengkapan, Pengadaan Aset dan Barang;
c. pelaksanaan [illegible] pengadaan [illegible];
d. pelaksanaan [illegible] pengadaan aset dan pengadaan barang [illegible];
e. pelaksanaan [illegible] dan pemeliharaan barang dan peralatan;
f. pelaksanaan [illegible] barang dan peralatan;
g. pelaksanaan [illegible] dan pengelola [illegible] pengadaan aset dan barang [illegible] dan [illegible];
h. pelaksanaan [illegible];
i. pelaksanaan [illegible] UPTD; dan
j. pelaksanaan [illegible] yang [illegible] oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33

(1) Susunan organisasi UPTD Perlengkapan, Pengadaan Aset dan Barang terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat struktural eselon IV a, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlengkapan, Pengadaan Aset dan Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

(1) Kepala UPTD Perlengkapan, Pengadaan Aset dan Barang wajib menyusun rencana kerja tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas dan Peraturan Barang dibidang perlengkapan, pengadaan aset dan barang, pemeliharaan barang operasional UPTD, berdasarkan rencana kerja

[illegible]

(2) Untuk [illegible] UPTD Perbenihan, Pengelolaan [illegible] dan [illegible] yang:

a. Menyusun [illegible] UPTD Perbenihan, Pengelolaan [illegible] dan [illegible];
b. Menyusun [illegible] dan [illegible] UPTD [illegible];
c. Menyusun [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
d. Melaksanakan pembinaan dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] UPTD perbenihan, pengelolaan [illegible] dan [illegible] [illegible] dan pengawasan [illegible];
e. Menyusun [illegible] dan [illegible] pelayanan [illegible] dan [illegible];
f. Menyusun [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
g. Menyusun [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
h. Menyusun [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
i. Melaksanakan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
j. Melaksanakan [illegible] dan [illegible];
k. Melaksanakan pemeliharaan dan [illegible] pengelolaan UPTD perbenihan dan pengelolaan [illegible] dan [illegible];
l. Mendata [illegible] [illegible];
m. Melaksanakan [illegible] yang [illegible] dan [illegible].

Pasal 23

(1) Untuk [illegible] Bagian Tata [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] UPTD perbenihan, pengelolaan [illegible] dan [illegible].

(2) Untuk [illegible] Bagian Tata [illegible] yang:

a. Menyusun [illegible] dan [illegible];
b. Menyusun dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
c. Menyusun [illegible] dan [illegible];
d. Menyusun dan [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dan [illegible];

[illegible]

Bagian Keempat
OPD Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak [illegible]
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 18

(1) OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam [illegible] dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak [illegible] dengan [illegible] pemerintah pemerintahan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas, OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. melaksanakan [illegible] dan [illegible] dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. melaksanakan koordinasi [illegible] [illegible] dengan [illegible];
c. melaksanakan [illegible] dan pelaporan [illegible] OPD; dan
d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh [illegible].

Paragraf 2
Struktur Organisasi
Pasal 21

(1) Struktur organisasi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat struktural eselon IV/a yang berasal dari/dari dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berasal dari/dari dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh seorang pejabat fungsional sesuai yang berasal dari/dari dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 22

(1) Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap korban termasuk informasi korban gender dan anak, termasuk rehabilitasi pemulihan pemberdayaan korban, yang berisiko serta pendampingan terhadap tersangka UPT.

(2) Uraian tugas Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
a. merumuskan kebijakan program dan kegiatan teknis dibidang upaya pelayanan korban pemberdayaan perempuan dan anak;
b. mendistribusi pelayanan terhadap pengaduan bagi korban termasuk informasi korban gender dan anak;
c. melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan korban sebagai dampak akibat pengaduan dan korban termasuk informasi korban gender dan anak;
d. mendampingi korban, perlindungan hukum dan pendampingan;
e. melaksanakan upaya perlindungan dan pengawasan terhadap korban termasuk korban termasuk informasi korban gender dan anak;

f. melaksanakan [illegible] pelayanan kesehatan dan sosial pelindungan;

g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan [illegible] bagi tenaga medis dan paramedis dalam penyelenggaraan [illegible];

h. melaksanakan [illegible] tenaga [illegible];

i. melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

k. melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

l. melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

UPTD Pengelolaan Bersama pada
Dinas Kependudukan [illegible]

Pasal 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 81

(1) UPTD Pengelolaan Bersama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pemrosesan, pelaksanaan program dan pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan sumber daya berdasarkan pemrosesan pemanfaatan sumber daya yang berbeda.

(2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pengelolaan Bersama mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan dan [illegible] dibidang pengelolaan bersama;
b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi terkait dan [illegible];
c. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 2
Susunan Organisasi
Pasal 82

(1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Bersama, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. [illegible] Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat struktural [illegible] yang berasal dari [illegible] dan [illegible] yang [illegible].

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagian struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Rumpak sebagaimana tersebut pada lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Uraian Tugas
Pasal 11

(1) Kepala UPTD Pengelolaan Rumpak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengelolaan rumpak, pemeliharaan, bimbingan operasional UPTD, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, lembaga pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah kerjanya dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dibidang pengelolaan rumpak sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

(2) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Rumpak, yaitu :

a. mengorganisasi bahan dan mengkaji dan mengendalikan dari rencana strategis UPTD kepada kepala dinas;
b. menyusun bahan dan menyusun dari RKA dan laporan RKA dan DPA UPTD Pengelolaan Rumpak;
c. melaksanakan pemeliharaan dari RKA dan laporan RKA dan DPA UPTD sesuai internal dan lainnya internal sesuai prosedurnya;
d. mengendalikan bahan dan menyusun pentunjuk pelaksanaan pengelolaan pemrosesan;
e. mengkaji dan menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan pemrosesan;
f. mengoordinasi kesatuan dalam pelaksanaan pengelolaan pemrosesan;
g. mengendalikan kesatuan dalam pelaksanaan pengelolaan pemrosesan;
h. melaksanakan kerjasama dengan pihak internal dinas terkait;
i. melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal dinas dinas terkait;
j. melaksanakan pelaksanaan atau pelaksanaan pengelolaan UPTD Pengelolaan Rumpak;
k. menerima konsep kerjasama dan
l. melaksanakan evaluasi dari rencana strategis UPTD Pengelolaan Rumpak;

Pasal 67

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelola dan urusan kantor, urusan UPTD Pengelolaan Sampah, perpustakaan, urusan rumah tangga, urusan kepegawai, kepangkatan, [illegible] [illegible] [illegible]

Bagian Tetapan Tugas
UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pasar
pada Dinas Perikanan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 44

(1) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas pengelolaan budidaya produksi dan ex situ serta secara berkelanjutan produksi benih ikan pembiakan induk induk dan angkut dalam jumlah dan mutu yang sesuai standar.

(2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pasar mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program produksi benih ikan;
b. Penyusunan rencana teknis operasional produksi dan budidaya ikan;
c. pelaksanaan program dan bidang teknis dibidang pembiakan induk ex situ dan budidaya ikan;
d. Pelaksanaan benih dan pembiakan induk ex situ ikan unggul;
e. Pelaksanaan kaji ulang terhadap perbaikan, Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan serta monitoring number dan kualitas produksi ikan budidaya di pembenihan;
f. Identifikasi, inventarisasi kegiatan teknis dan fasilitasi dan bimbingan dalam rangka pemanfaatan produksi dan mutu benih serta pengelolaan sarana pembenihan;
g. Pelaksanaan pemeliharaan pembenihan tugas dinas;
h. Pengadaan bahan-bahan, peralatan-peralatan pembenihan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Struktur Organisasi
Pasal 45

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pasar, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Umum;
c. Seksi yang Adalah Fungsional dan
d. Tenaga Teknis.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih oleh pejabat struktural eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(8) Kepala Subdinas [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh seorang pejabat fungsional sesuai yang berlaku dilunak dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(9) Kepala Seksi [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh seorang tenaga teknis sebagai penanggung jawab [illegible] yang berlaku dilunak dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(10) Bagian Tata Usaha Organisasi UPTD Balai Benih dan [illegible] Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 [illegible]
Jenis Tugas
Pasal 8[illegible]

(1) Kepala UPTD Balai Benih dan [illegible] Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas pertanian dibidang produksi dan [illegible] pertanian berdasarkan [illegible] UPTD, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Dinas, instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di lingkup [illegible] pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidang produksi dan [illegible] pertanian berdasarkan [illegible] pertanian berdasarkan [illegible].

(2) Dalam tugas Kepala UPTD Balai Benih dan [illegible] Pertanian:

a. [illegible] pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang [illegible] dan [illegible] di lingkungan [illegible];
b. melaksanakan pelaksanaan, [illegible] dan pengendalian pelaksanaan kegiatan [illegible] dan [illegible] sebagai pengelola benih [illegible], pengelola [illegible] dan [illegible] dibidang produksi dan [illegible];
c. melaksanakan pengadaan, [illegible] dan pemanfaatan [illegible] pertanian dan [illegible];
d. melaksanakan produksi dan pelayanan [illegible] [illegible] pertanian dan [illegible];
e. melaksanakan kerjasama [illegible] [illegible] [illegible] Dan Perkebunan dan [illegible] [illegible] [illegible];
f. melaksanakan [illegible] kegiatan [illegible] [illegible] melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible];
g. melaksanakan kegiatan [illegible] kepada Kepala Dinas sebagai [illegible] [illegible] dijadikan bahan pertimbangan [illegible];
h. melaksanakan hasil [illegible] dan [illegible]; dan
i. melaksanakan tugas [illegible] lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 47

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengurus kerja kantor UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan organisasi dan tata laksanaan, kepegawaian, umum, keuangan, perlengkapan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, kearsipan, administrasi, protokol, pelaksanaan urusan dan pembinaan kepada kantor, urusan tugas pembantu pimpinan dan tugas lainnya yang berkaitan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Untuk tugas Kepala Sub Bagian Umum, yaitu :

a. melaksanakan program kerja UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai dengan rencana kerja dan tugas Umum sesuai dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b. mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan penyusunan bahan untuk pemecahannya;
c. menyiapkan pelaksana pemantau keuangan yang berhubungan dengan bidang permasalahan dan dan konsep serta pemantau pemantauan keuangan yang berhubungan dengan bidang kelancaran tugas Sub Bagian Umum;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawai yang meliputi pembuatan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta administrasi kepegawaian;
f. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan kehumasan, protokol dan pembinaan kepada kantor;
i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi serta perpustakaan;
j. menyiapkan, mengumpulkan dan mencatatkan pegawai serta rencana tahunan dilingkungan Sub Bagian Umum agar dapat melaksanakan tugas secara terencana dan berhasil guna;
k. mengumpulkan, mengolahan, menyusun data dan informasi dari kantor sebagai bahan untuk pembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan yang dijadikan acuan dalam pengam serta laporan;
l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
m. melaksanakan tugas bawahan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Empat Belas
UPTD Dinas Perdagangan Kota (TR)
pada Dinas Perdagangan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 98

(1) Tugas UPTD TR Dinas Perdagangan Kota pada Perdagangan mempunyai tugas operasional dan pengawasan Dinas dalam pelaksanaan pelayanan pelayanan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan pengawasan pedagang kecil, pemberdayaan dan pengawasan pedagang informasi pedagang kecil, pemantauan dan pemeliharaan dan sarana dan prasarana lain-lainnya.

(2) UPTD TR Dinas Perdagangan kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengawasan Dinas di bidang pengelola dan dan pelayanan perdagangan kecil;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pengelolaan kesekretariatan, pemantauan, keuangan dan kepegawaian;
c. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan perdagangan kecil;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pedagang kecil;
e. Pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan dan sarana dan prasarana lain-lainnya;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pelaksanaan kegiatan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 99

(1) Susunan organisasi UPTD Dinas Perdagangan Kecil TR, terdiri dari:
1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipegang oleh pejabat struktural eselon IV/a yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipegang oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipegang oleh seorang pejabat fungsional tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(2) Kepala Pelaksana Harian [illegible] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas dan [illegible] [illegible] pelaksanaan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] Kepala UPTD.

(3) Bagian Pelaksana Organisasi UPTD Tempat Pembayaran Bus (TPB) sebagaimana [illegible] dalam Lampiran III dan [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Uraian Tugas

Pasal 10

(1) Tugas Pokok Kepala UPTD Tempat Pembayaran Bus (TPB) adalah melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible]

(2) Uraian kedudukan, tugas, [illegible] sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf [illegible] pada UPTD TK Dinas Pendidikan Kota adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan program dan rencana kerja UPTD TK Dinas Pendidikan Kota sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan [illegible] pertanggungjawaban yang berhubungan dengan [illegible] tugas dan fungsi Dinas [illegible] dan menyusun bahan [illegible] pemerintah [illegible];
c. mengelola [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] serta produksi [illegible] bersama produksi [illegible] dengan memenuhi ketentuan [illegible] yang berlaku.

(2) Kepala [illegible] UPTD Balai Produksi Benih/Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas:

a. [illegible] program dan [illegible] [illegible] dan [illegible] serta produksi [illegible] [illegible];
b. [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible];
c. [illegible] [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] UPTD; dan
d. [illegible] [illegible] yang [illegible] oleh [illegible].

Pasal 2
Susunan Organisasi
Pasal 33

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Produksi Benih/Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, [illegible]:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat oleh pejabat berwenang [illegible] yang berasal dari [illegible] Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat oleh [illegible] Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berasal dari [illegible] Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat oleh [illegible] pejabat fungsional [illegible] yang berasal dari [illegible] Kepala UPTD.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Produksi Benih/Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana [illegible] dalam Lampiran XII dan sebagaimana bagan yang [illegible] dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Uraian Tugas
Pasal 34

(1) Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas [illegible] sebagaimana tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaan dibidang produksi benih tanaman pangan dan hortikultura serta produksi [illegible], [illegible] perkebunan, pembinaan [illegible] operasional UPTD, [illegible] [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]

[illegible] pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan [illegible] produksi benih varietas jagung dan hortikultura serta produksi bibit varietas, pelaksanaan [illegible] dengan [illegible] pelaksanaan [illegible] produksi benih varietas jagung dan hortikultura serta produksi bibit varietas [illegible];

12. [illegible] Kepala UPTD Balai Produksi Benih Varietas Jagung, Benih dan Hortikultura, [illegible]:

a. menerima, [illegible], mempertimbangkan, menyiapkan dan menyusunkan pelaksanaan program dan anggaran varietas [illegible] produksi benih varietas jagung dan hortikultura serta produksi bibit varietas [illegible];

b. menyusunkan petunjuk pelaksanaan jagung yang berhubungan dengan [illegible] produksi benih varietas jagung dan hortikultura serta produksi bibit varietas [illegible] pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. [illegible] pelaksanaan tugas sesuai [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible];

d. [illegible] pelaksanaan, [illegible] dan [illegible] produksi benih varietas jagung dan hortikultura serta produksi bibit varietas [illegible];

e. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] serta [illegible] tugas [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Kepala [illegible];

f. [illegible] [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] produksi benih varietas jagung dan hortikultura serta produksi bibit varietas [illegible] dengan pihak [illegible];

g. [illegible] produksi benih varietas jagung dan hortikultura serta produksi bibit varietas [illegible] [illegible];

h. [illegible] pelaksanaan [illegible] produksi benih varietas jagung, hortikultura dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

a. [illegible] [illegible] Kepala Dinas [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Bagian Keempat Belas
UPTD Pelabuhan Penyeberangan Perintis

Paragraf 1
Organisasi Bangkit
Pasal 86

(1) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Perintis merupakan unsur pelaksana teknis dan/atau teknis operasional di bidang penyelenggara pelabuhan dan wahana angkutan dan angkutan di bidang pelabuhan penyeberangan kecamatan pengelola, berdasarkan asas profesionalisme sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna angkutan yang andalan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pelabuhan Penyeberangan Perintis mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pelabuhan kecamatan pengelola, berdasarkan asas profesionalisme;
b. pelaksanaan kemitraan tugas dengan instansi terkait dan kecamatan pengelola;
c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pegawai UPTD; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kedudukan Organisasi
Pasal 87

(1) Kedudukan organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Perintis terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih oleh pejabat dimaksud dalam PP/Perpres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kepala Bidang Organisasi UPTD Pelaksanaan Penyelidikan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Uraian Tugas

Pasal 5A

(1) Kepala UPTD Pelaksanaan Penyelidikan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibidang pelaksanaan penyelidikan perikanan, pembinaan terhadap operasional UPTD, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Camat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dalam di wilayah kerjanya sesuai pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam tugas Kepala UPTD Pelaksanaan Penyelidikan Perikanan, yaitu :

a. menelaah, menilai, mempertimbangkan, menyusun dan mengendalikan pelaksanaan program dan anggaran dinas dibidang pembangunan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

b. menyusun prosedur pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugas di kecamatan dan mengatasi masalah;

d. melaksanakan koordinasi dengan kecamatan pada bidang penyiapan, pemanfaatan, pengendalian, dan koordinasi produksi benih, pengembangan mutu benih, pengembangan dan pelestarian lahan, pengendalian organisasi pengangga, Tenaga ke UPTD dan optimal mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

e. melaksanakan koordinasi di tingkat kecamatan pada bidang penyiapan, pemanfaatan, pengendalian organisasi, dan produksi sumber produksi, alat mesin pertanian, tenaga pertanian, lahan, dan lingkungan hidup;

f. melaksanakan koordinasi di tingkat kecamatan pada bidang pelaksanaan monitor dan evaluasi dan pelaporan, termasuk usaha optimasi, pengadaan hasil, pemasar dan pemasaran serta pengawasan perkebunan;

g. melaksanakan koordinasi dan pengawasan di tingkat kecamatan pada bidang konservasi sumber produksi hayati, pemulihan hayati;

h. melaksanakan pelaksanaan tugas Pengendalian Lahan dan DAS (DAL) untuk mendukung ketersediaan produksi untuk pemenuhan wilayah kerjanya berkerjasama dengan pejabat fungsional UPTD;

(3) Bagian [illegible] Organisasi UPTD Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII dan sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Jenis Tugas

Pasal 38

(1) Kepala UPTD Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah, Kearsipan dan Perpustakaan dibidang pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, pembinaan terhadap operasional UPTD, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Camat, Instansi Pemerintah dan organisasi sosial di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan dan pengelolaan perpustakaan dibidang [illegible] perpustakaan dan pelestarian [illegible] dengan [illegible] pemerintahan [illegible] yang berlaku.

(2) Jenis tugas Kepala UPTD Pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan yaitu :

a. menyusun, [illegible], mengembangkan, mencatat dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan [illegible] dibidang pelaksanaan [illegible] perpustakaan, kearsipan, dan pelestarian ;

b. menyusun pedoman pelaksanaan [illegible] yang berhubungan dengan bidang kearsipan, perpustakaan, [illegible] dan pelestarian sebagai acuan dalam [illegible] ;

c. mengembangkan pelaksanaan tugas sesuai [illegible] [illegible] ;

d. melaksanakan koordinasi dengan [illegible] pada bidang pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan [illegible] perpustakaan [illegible], pengembangan perpustakaan, pengadaan [illegible] [illegible] pengelolaan [illegible] [illegible] dan aplikasi [illegible] perpustakaan [illegible] dan pelestarian ;

e. melaksanakan koordinasi di bidang kearsipan [illegible] bidang pembinaan, pelaksanaan, pengendalian [illegible] dan pelestarian arsip [illegible] ;

f. melaksanakan koordinasi di bidang kearsipan [illegible] bidang pengelolaan arsip [illegible] [illegible] dan pelestarian arsip [illegible] ;

g. melaksanakan koordinasi dan pengawasan dibidang kearsipan [illegible] bidang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan pelestarian ;

h. melaksanakan pelaksanaan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Pasal 10

(1) [illegible]

(2) [illegible]

f. melaksanakan [illegible] pengawasan;
g. melaksanakan pengadaan barang [illegible] sesuai [illegible] perbendaharaan;
h. melaksanakan pengadaan barang [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible];
i. melaksanakan pengadaan [illegible] [illegible] [illegible];
j. melaksanakan, mengawasi dan [illegible] [illegible] [illegible] Pengadaan Barang [illegible] [illegible] [illegible]

Paragraf 2
Kepala Organisasi
Pasal 62

(1) Kepala organisasi UPTD RPH bertugas dan :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pegawai berdasarkan kualifikasi PNS yang berasal dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berasal dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional tertinggi yang berasal dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD RPH sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 63

(1) Kepala UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibidang pemotongan hewan dan penyediaan daging yang memenuhi syarat syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dan melaksanakan sebagian fungsi Rumah Potong Hewan (RPH), pemasaran dan pemeliharaan Tata Bangun Rumah Potong Hewan (RPH) berdasarkan Peraturan Perundang-undang, Dinas, Pusat dan Daerah, Kebersihan, Sanitasi, Kesehatan, dan ketentuan Teknis Pengelola Administrasi, Pengelola keuangan dan Pengelola RPH.

(2) Uraian tugas Kepala UPTD RPH, antara :
a. merumuskan, menetapkan, program/kegiatan, sasaran/target dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai operasional dibidang Rumah Potong Hewan (RPH);
b. mengendalikan pemotongan hewan dan penyediaan daging yang memenuhi syarat syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal);
c. melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai kelas dan fungsi;
d. mengendalikan sanitasi pemotongan hewan dan;
e. melaksanakan pemeriksaan hewan hewan yang memenuhi syarat kesehatan maupun kesehatan masyarakat veteriner;
f. mengendalikan sanitasi penyimpanan daging di ruang dingin dan sebelum daging diperdagangkan;

[illegible]

1) Unsur Tata Usaha Negara [illegible] sebagaimana dimaksud pada [illegible] huruf a [illegible] UU [illegible] [illegible] organisasi dan administrasi [illegible] pengelolaan [illegible] kepegawaian, [illegible] [illegible] [illegible]

Bagian Kedelapan Belas
UPTD Balai Pendidikan Ternak
pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Nama dan Fungsi
Pasal 69

(1) UPTD Balai Pendidikan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dibidang pendidikan, pelatihan dan kursus pegawai dan anggota dibidang peternakan ternak sesuai dengan kebutuhan, serta pengembangan sumberdaya manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Balai Pendidikan Ternak mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengkaji dan bimbingan teknis dibidangnya dibidang ternak;
b. pelaksanaan kesatuan tugas sesuai bidang teknis sesuai kemampuan ternak;
c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 70

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Pendidikan Ternak, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat struktural dengan Eselon IV.a yang berasal dari dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berasal dari dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berasal dari dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pendidikan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran II
Peraturan Daerah
Tanggal [illegible]

1) Kepala UPTD Balai Pendidikan Pendidikan [illegible] dalam melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan teknis operasional [illegible] Pendidikan Tertentu.

2) Uraian tugas Kepala UPTD Balai Pendidikan Tertentu, yaitu :

a. menyiapkan, mengelola, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan teknis operasional [illegible] Pendidikan Tertentu;
b. menyusun program dan kegiatan pendidikan tertentu;
c. melaksanakan kegiatan [illegible] tertentu;
d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi teknis operasional pendidikan tertentu pada lembagaan pendidikan [illegible] tertentu;
e. melaksanakan [illegible] tertentu;
f. melaksanakan Pendidikan Tertentu, Pendampingan [illegible] tertentu;
g. mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di lembagaan tertentu;
h. melaksanakan [illegible] dan pemantauan pelaksanaan [illegible] yang [illegible] lembagaan;
i. melaksanakan dan mengelola pelaksanaan kegiatan [illegible];
j. melaksanakan pendidikan dan mengembangkan tertentu tertentu yang [illegible] [illegible] lembagaan tertentu [illegible];
k. melaksanakan pendidikan dan mengembangkan tertentu tertentu yang [illegible] [illegible] tertentu;
l. menyusun [illegible] [illegible] pendidikan tertentu;
m. melaksanakan pengelolaan [illegible] tertentu dengan [illegible] dan [illegible] [illegible];
n. melaksanakan [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] pendidikan tertentu;
o. melaksanakan [illegible] dan [illegible] [illegible] pendidikan tertentu;
p. melaksanakan [illegible] dan [illegible] pengelolaan [illegible] pendidikan tertentu di lembagaan tertentu [illegible] pendidikan tertentu;
q. [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] pendidikan tertentu;
r. [illegible] [illegible] tertentu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pengembangan tertentu;
s. [illegible] kegiatan [illegible] yang [illegible] dengan pelaksanaan pendidikan tertentu; dan
t. melaksanakan tugas [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible].

Pasal 61

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program kerja berdasar [illegible] Tersedia, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawai, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, [illegible], kesejahteraan, [illegible], pelaksanaan [illegible] dan pembinaan Jaringan Kantor, serta tugas pembantu pelaksanaan tugas yang [illegible] [illegible] pelaksanaan [illegible] dan [illegible].

(2) Untuk tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, [illegible]:

a. melaksanakan program kerja [illegible] Tersedia, serta [illegible] Sub Bagian Tata Usaha [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
b. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Bagian [illegible] Tiga
UPTD Pusat [illegible] Bintan
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Paragraf I
Nama dan Bentuk
Pasal 63

(1) UPTD Pusat [illegible] Bintan (Pendidikan) [illegible] Bagian [illegible] dan [illegible] pengajaran [illegible] pelaksanaan [illegible] pengajaran [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible]

Lampiran I
Peraturan Bupati
Pasal 19

(1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Klinik operasional Gilibang Puskesmas.

(2) Dalam tugas Kepala UPTD Puskesmas, antara :

a. merencanakan, mengatur, mengoordinasi, menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Klinik operasional Gilibang Kepala Puskesmas (PPK);

b. melaksanakan pemeriksaan [illegible] pasien [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Pasal 71

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program kerja bagian UPTD/Puskesmas, pengumpulan, [illegible] dan konsultasi [illegible], pengelolaan [illegible], kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, [illegible], pelaporan dan evaluasi sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur [illegible] yang berlaku dan [illegible] oleh atasan sesuai dengan tugas pokok.

(2) Uraian tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu:

a. melaksanakan program kerja UPTD/Puskesmas, [illegible] tugas Sub Bagian Tata Usaha sesuai [illegible] dalam [illegible] tugas;
b. [illegible] pelaksanaan [illegible] yang berhubungan dengan [illegible] tugas Sub Bagian Tata Usaha [illegible] pelaksanaan tugas;
c. [illegible] yang berhubungan dengan [illegible] yang berhubungan dengan [illegible] yang berhubungan dengan [illegible] sesuai [illegible] dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
d. [illegible] pengumpulan dan pengolahan [illegible] perencanaan, [illegible] dan [illegible];

[illegible]

Bagian Ketiga Belas
UPTD Perpustakaan Daerah
pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 71

(1) UPTD Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang perpustakaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan dibidang perpustakaan, pengumpulan, dokumen, informasi, pencatatan pengelolaan perpustakaan yang berbasis.

(2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang perpustakaan daerah;
b. melaksanakan koordinasi tugas dengan unsur-unsur terkait dalam lingkup wilayah;
c. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Bagian
Pasal 31

(1) Kepala Bagian [illegible] (UPT) Pelayanan Pasar, [illegible] dari:
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari pejabat struktural eselon IV/a yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Kepala Bagian
Pasal 32

(1) Kepala UPT Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di wilayah kerjanya, pembinaan teknis operasional UPT, melaksanakan tugas sesuai dan berdasarkan bidang tugas, [illegible] pembinaan dan organisasi kerjanya di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan [illegible] pelayanan, pembinaan dengan [illegible] pembinaan pengelolaan [illegible].

(2) Untuk tugas kepala UPT Pelayanan Pasar, yaitu:
a. menyusun, [illegible], mengevaluasi, [illegible] [illegible] pelaksanaan program dan kegiatan [illegible] pengawasan, pengendalian dan pembangunan [illegible];
b. [illegible] pelayanan [illegible] dengan [illegible] dalam lingkup pelaksanaan tugas;
c. [illegible] pelaksanaan tugas [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible];
d. [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;

[illegible]

Pasal 7[illegible]

(1) Bagian Tata Bagian Tata [illegible] [illegible] [illegible]

j. [illegible] dan [illegible] Jabatan Fungsional [illegible] Bagian Tata Usaha dan [illegible] Perdagangan;

k. [illegible] Bagian Tata Usaha dan [illegible] Perdagangan [illegible] Jabatan Fungsional [illegible] sesuai [illegible] yang berlaku;

l. [illegible] dan [illegible] dari [illegible] sesuai [illegible] yang berlaku;

m. [illegible] dan [illegible] yang [illegible] oleh [illegible].

UPTD [illegible]
pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 76

(1) UPTD [illegible] dan [illegible] [illegible] tugas [illegible] [illegible] yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD [illegible] Dinas Perdagangan dan Perindustrian [illegible]:

a. [illegible] [illegible] dan [illegible];

b. [illegible] [illegible] dan [illegible];

c. [illegible] dan [illegible];

d. [illegible] dan [illegible];

e. [illegible] dan [illegible];

f. [illegible] dan [illegible].

Paragraf 2
Struktur Organisasi
Pasal 77

(1) Susunan organisasi UPTD [illegible] [illegible] [illegible]:

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) [illegible] Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Bagian Tata Usaha yang secara [illegible] dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang [illegible] dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagian Struktur Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan dan Penetapannya sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Unsur Tugas
Pasal 36

(1) Kepala UPTD bertugas [illegible] dan Bimbingan [illegible] tugas [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible].

(2) [illegible] tugas [illegible] UPTD [illegible] dan Bimbingan [illegible]:

a. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
b. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
c. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
d. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
e. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
f. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
g. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
h. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
i. [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible].

j. [illegible] hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja Sub Bagian; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 71

(1) Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan pegawai, kerja sama, DPIS Inspektorat Jenderal dan Bimwasja, perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, perpustakaan, arsip, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, [illegible], persandian, pengelolaan keuangan dan pembinaan karier [illegible], sesuai dengan pembagian pekerjaan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Untuk tugas Kepala Sub Bagian Tata usaha, yaitu :

a. melaksanakan pengurus [illegible] DPIS Inspektorat Jenderal dan Bimwasja, serta urusan kerja Sub Bagian Tata Usaha untuk dijadikan bahan urusan dalam pelaksanaan tugas;

b. [illegible] yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan pengurusan bahan untuk pemutusan [illegible];

c. menyiapkan pelaksanaan perencanaan-[illegible] yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Bimwasja serta pemrosesan perencanaan-[illegible] yang berhubungan dengan tugas ketatalaksanaan [illegible] urusan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

d. melaksanakan pengurusan [illegible] dan pelaksanaan [illegible] tugas Sub Bagian Tata Usaha;

e. melaksanakan pengurusan urusan [illegible] yang [illegible] pelaksanaan [illegible] serta pemrosesan [illegible] [illegible];

f. melaksanakan urusan [illegible] kepegawaian;

g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

h. melaksanakan pengelolaan [illegible], persandian dan pemeliharaan [illegible];

i. melaksanakan pengelolaan [illegible] serta perpustakaan;

j. [illegible] Inspektorat Jenderal dan [illegible] Sub Bagian Tata Usaha agar tugas melaksanakan tugas secara berhasil guna [illegible];

k. [illegible] tugas Sub Bagian Tata Usaha [illegible] Inspektorat Jenderal Pengawasan Umum [illegible] kepada [illegible] dan [illegible] [illegible].

[illegible]

Bagian Kelima Belas
UPTD Pelayanan Pajak
pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Bagan dan Fungsi
Pasal 86

(1) UPTD Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan pendaftaran dan [illegible] program dan kegiatan dibidang pendaftaran dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pelayanan Pajak menyelenggara fungsi:

a. pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi terkait dalam lingkungannya masing-masing;
c. pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kedudukan Organisasi
Pasal 87

(1) Kedudukan organisasi UPTD Pelayanan Pajak terdiri dari :

a. Bagian UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran I
Peraturan Daerah
Pasal 102

(1) Pejabat DPPD Pelaksana Pajak mempunyai tugas merencanakan, menilai, mengembangkan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis operasional dibidang penyuluhan dan pengaduan pajak daerah.

(2) Uraian tugas Pejabat DPPD Pelaksana Pajak, yaitu :

a. menelaah, menilai, mengembangkan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis operasional dibidang penyuluhan dan pengaduan pajak daerah;
b. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan dan evaluasi pajak daerah;
c. melaksanakan konsultasi kepada masyarakat perihal ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah agar masyarakat memahami pentingnya pajak daerah, dan kewajibannya berdasarkan wajib pajak daerah untuk mendukung tertib administrasi;
d. melaksanakan kegiatan penilaian terhadap wajib pajak daerah dalam rangka identifikasi dan identifikasi potensi sesuai ketentuan perundang-undang;
e. melaksanakan pengaduan pajak daerah terhadap wajib pajak daerah yang telah dibuka, diteliti dan dikumpulkan dan dibuatkan risalah;
f. melaksanakan koordinasi secara konsisten dengan Camat dan aparat desa dalam melaksanakan pemutakhiran data pengaduan pajak daerah;
g. melaksanakan dan mengumpulkan hasil pendataan dan pengaduan pajak daerah agar target penagihan pendapatan asli daerah dapat tercapai;
h. menyusun dan mengumpulkan laporan hasilnya, konsultasi, pemantauan dan tulisan sesuai bagian Bidang Bakan sebagai pertanggungjawaban kerja;
i. melaksanakan tugas kepada atasannya dalam Pengadaan [illegible] sebagai konsultasi, agar sesuai prosedur [illegible] dan tanggung jawabnya [illegible];
j. [illegible] laporan [illegible] [illegible] sebagai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
k. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Pasal 63

(1) Kepala Dinas Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program kerja UPTD Pelayanan Pajak, pembinaan administrasi dan ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawai, keuangan, perlengkapan, humas dengan bidangnya masing-masing, urusan perencana, pembuat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bagian Barang, urusan dengan pengelolaan perlengkapan bagian yang berkaitan urusan pelaksanaan tugas.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu :

a. melaksanakan program kerja UPTD Pelayanan Pajak, agar tercapai kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tahap [illegible] pelaksanaan tugas;
b. mengelaborasikan permasalahan [illegible] yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan pemecahan tahap untuk pertimbangan;
c. mengumpul pemikiran pertimbangan [illegible] yang berhubungan dengan bidang pembinaan dan pengelolaan pajak daerah [illegible] pertimbangan [illegible] yang berhubungan dengan bidang [illegible] sebagai bahan [illegible] pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan [illegible] dan [illegible];
e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi [illegible] yang meliputi pembinaan, pemanfaatan [illegible] serta pelaksanaan [illegible] [illegible];
f. melaksanakan urusan administrasi [illegible];
g. melaksanakan pengelolaan urusan [illegible] [illegible] [illegible];
h. melaksanakan [illegible] urusan [illegible] [illegible] [illegible];
i. melaksanakan pengelolaan [illegible] [illegible] [illegible];
j. melaksanakan, [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] Sub Bagian Tata Usaha agar [illegible] melaksanakan tugas [illegible] [illegible] [illegible];
k. membagi tugas agar Sub Bagian Tata Usaha kepada [illegible] sesuai Pangkat [illegible] sesuai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
l. mengumpulkan, mengolah, menyusun data dan informasi dari bawahan sebagai bahan untuk [illegible] [illegible] pelaksanaan tugas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalam program kerja [illegible];
m. mengatur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

UPTD Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata
pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 69

(1) UPTD Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata dibidang pendidikan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kewenangan pemerintah pemerintah kabupaten yang berlaku.

(2) Selain melaksanakan tugas, UPTD Pendidikan Kebudayaan dan

Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan program dan kegiatan teknis dibidang pendidikan kebudayaan dan pariwisata;
b. pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi terkait dalam lingkungan [illegible];
c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 70

(1) Susunan organisasi UPTD Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(4) Rincian Tugas dan Fungsi UPTD Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Paragraf (2) dan ketentuan lagi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Urusan Tugas
Pasal 80

(1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas merumuskan, mengatur, mengendalikan, [illegible] dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan operasional dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

(2) Urusan tugas Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu :

a. merumuskan, mendalam, mengendalikan, [illegible] dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan operasional dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. [illegible] program dan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. melaksanakan [illegible] kepada masyarakat perihal pemadam kebakaran dan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
d. melaksanakan bagian pemadam kebakaran [illegible] pemadam kebakaran;
e. melaksanakan [illegible] pemadam dan penyelamatan;
f. melaksanakan koordinasi urusan [illegible] dengan urusan [illegible] dan dalam melaksanakan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
g. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
h. mengatur dan mengendalikan [illegible] kebakar, [illegible], [illegible] dan [illegible] kepada [illegible] [illegible] sebagai pedoman [illegible] tugas;
i. melaksanakan [illegible] tugas kepada [illegible] [illegible] Pengawas [illegible] sebagai [illegible] [illegible] [illegible] pemadam kebakaran dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
j. [illegible], [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] sebagai [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata usaha, yaitu :

a. melaksanakan pengelola barang UPTD Pendidikan Kebudayaan dan Pengembangan, serta Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dijabarkan kepada sesuai dalam pelaksanaan tugas;
b. mengelola urusan perlengkapan perlengkapan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan pelaksanaan bahan sesuai pemendaman;
c. menyusun perencana perencana-rencana yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan pelaksanaan serta pelaksana perencana-rencana yang berhubungan dengan bidang [illegible] sesuai bantuan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pelaksana organisasi dan tata laksana;
e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi [illegible] yang meliputi permintaan, pendaftaran serta pelaksana barang [illegible] barang;
f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, [illegible] dan pelaksana [illegible] barang;
i. melaksanakan pengelolaan administrasi serta perpustakaan;
j. melaksanakan [illegible] dan [illegible] [illegible] Pengembangan Unsur dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan melaksanakan tugas [illegible] berlaku [illegible] dan [illegible];
k. melaksanakan [illegible] Sub Bagian Tata Usaha [illegible] [illegible] Pengembangan Unsur sebagai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
l. mengumpulkan, mengolahkan, menyusun data dan informasi dan [illegible] sebagai bahan [illegible] laporan pelaksanaan tugas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
m. mengumpulkan hasil pelaksanaan tugas [illegible];
n. melaksanakan tugas [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible].

BAB IV

[illegible] JABATAN FUNGSIONAL

Pasal [illegible]

(1) Setiap pejabat Jabatan Fungsional pada UPTD dimungkinkan [illegible] kondisi dan [illegible] yang [illegible] untuk dengan [illegible] pelaksana pemantauan [illegible] yang bersifat.

(2) Setiap pejabat Jabatan Fungsional [illegible] yang [illegible] dalam [illegible] Jabatan Fungsional yang [illegible] dalam [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] dan [illegible].

(3) Setiap [illegible] dapat [illegible] oleh [illegible] yang [illegible] Fungsional [illegible] yang [illegible] oleh [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] UPTD.

(4) Jumlah jabatan Fungsional [illegible] [illegible] [illegible] dan beban kerja.

(5) Jenis dan [illegible] jabatan Fungsional [illegible] [illegible] pelaksana [illegible] [illegible] yang berlaku.

BAB V

PENGEMBALIAN GAJIAN JABATAN

Pasal [illegible]

(1) Pengembalian dan [illegible] [illegible] pejabat dan pegawai UPTD [illegible] [illegible] dengan [illegible] pelaksana [illegible].

(2) Pengembalian [illegible] dan pegawai [illegible] [illegible] pada [illegible] (1) [illegible] [illegible] [illegible] dengan [illegible] yang [illegible].

BAB VI

[illegible]

Pasal [illegible]

(1) Kepala UPTD dalam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] yang [illegible].

(2) Kepala UPTD dalam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

(3) Kepala UPTD [illegible] dan [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

(4) Kepala UPTD dalam [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Lamtim Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur;

b. Peraturan Bupati Lamtim Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur;

c. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur;

d. Peraturan Bupati Lamtim Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur;

e. Peraturan Bupati Lamtim Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur;

f. Peraturan Bupati Lamtim Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur;

g. Peraturan Bupati Lamtim Nomor 2004 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur; dan

h. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendelegasian, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 [illegible] 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

[illegible] ZULKARNAIN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 [illegible] 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

[illegible]

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2371

CONSEJO MUNICIPAL
ESCUELA DE ATENCION PERSONAL
PERSONAL DE SALA / PELUQUERIA

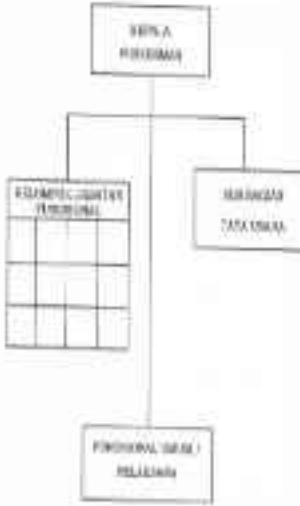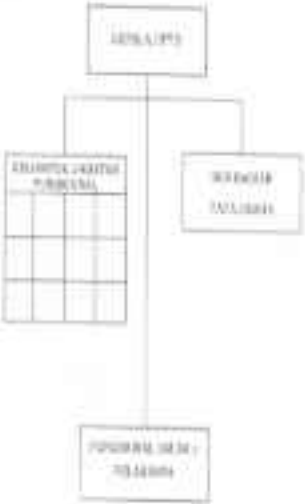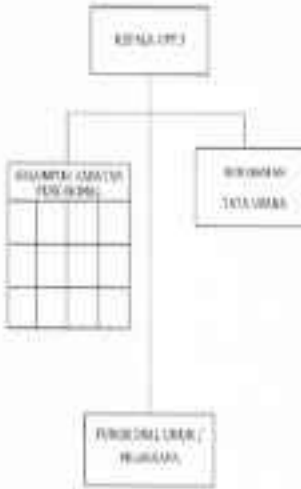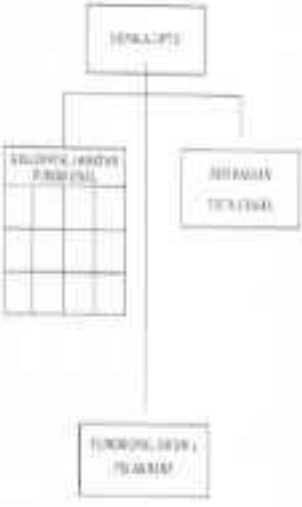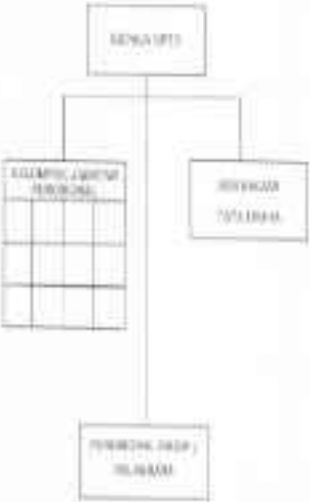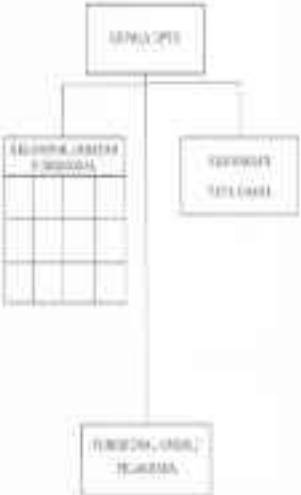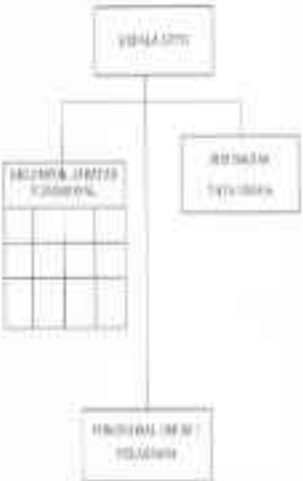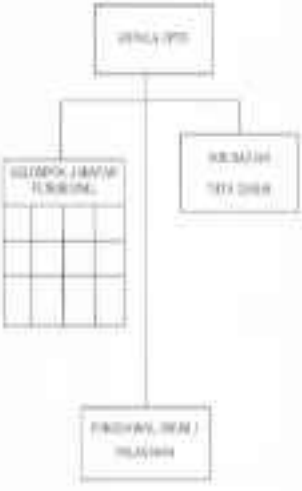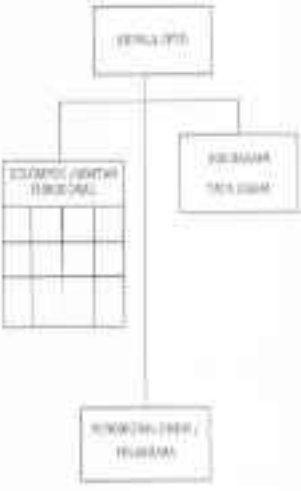
KEPALA
PUSKESMAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA
TATA USAHA
PERSONAL SAMA
PELAYANAN